

PENGUATAN KAPASITAS PENGURUS REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

Annisa Nur Fathin

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Email : fathin_annisa@yahoo.co.id

R. Enkeu Agiati

agiatienkeu@yahoo.co.id

Neni Kusumawardhani

nenikusumawardhani@ymail.com

Abstract

Capacity building is the capability enhancement process of the Community-Based Rehabilitation (RBM) caretaker in providing services to persons with disabilities, so they could access their needed services. The purpose of this research is to study Capacity Building of Community-Based Rehabilitation to Accessibility of Persons with Disabilities in Cibiru Wetan Village, Cileunyi Sub-district, Bandung Regency. The research method used is qualitative with action research design. Data source used is primary data source and secondary data source. The data collection techniques used were in-depth interviews, participant observation, documentation study, and Focus Group Discussion (FGD). Data validity checking technique used is credibility, transferability, dependability, and confirmability. Furthermore, the results of this study were analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed that the capacity building of RBM Cibiru Wetan caretaker enhances the capability of RBM caretaker to provide services to persons with disabilities. Shown by RBM Cibiru Wetan caretaker in providing services to identify the needs and problem of persons with disabilities, assessment, planning and working matrix, improving the RBM management, as well as recording the handling of cases of persons with disabilities. The RBM caretaker capacity impacts the quality of RBM services to be comprehensive and based on social work.

Keywords: accessibility capacity building, Community-Based Rehabilitation

Abstrak

Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Penguatan Kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan *design action research*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif (*participant observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu dengan uji kepercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji ketergantungan (*dependability*), dan uji kepastian (*confirmability*). Selanjutnya, hasil penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas terhadap pengurus RBM Cibiru Wetan dapat

meningkatkan kemampuan pengurus RBM dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan pengurus RBM Cibiru Wetan dalam memberikan pelayanan melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah penyandang disabilitas, asesmen, menyusun perencanaan dan matriks kerja, meningkatkan manajemen RBM, serta melakukan *recording* penanganan kasus penyandang disabilitas. Kapasitas pengurus RBM tersebut berdampak pada pelayanan aksesibilitas RBM menjadi komprehensif dan berbasis metode serta teknik pekerjaan sosial.

Kata kunci : aksesibilitas, penguatan kapasitas, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengarah pada perwujudan masyarakat inklusi. Paradigma mengenai penyandang disabilitas, yang awalnya berbasis institusi, saat ini sudah beralih menjadi berbasis masyarakat dan hak. Selain itu, saat ini penyandang disabilitas tidak lagi menjadi obyek tetapi menjadi subyek. Hal ini sesuai dengan paradigma penyandang disabilitas yang sudah beralih dari *medical model* menjadi *social model*, dimana menurut Jewell (2010) penyandang disabilitas dalam paradigma *social model* adalah sebagai berikut : Penyandang disabilitas terjadi karena ketidakcocokan antara individu dan lingkungan.

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan individu dan karena lingkungan tidak beradaptasi untuk mengakomodasi jangkauan seseorang. Pengertian penyandang disabilitas yang saat ini sudah mengacu pada interaksi individu dengan lingkungan menjadi dasar pemikiran bersama bahwa kedisabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Apabila tanggung jawab tersebut tidak diimplementasikan dengan baik maka akan berdampak pada ketidaksetaraan hak. Paradigma berbasis hak bagi penyandang disabilitas tidak serta merta dapat diterapkan dengan mudah di masyarakat.

Hak penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tetapi permasalahan pun masih tetap dialami. Permasalahan tersebut

antara lain mengenai sarana prasarana publik yang terbatas, keterbatasan pemahaman dan keterlibatan keluarga, sikap negatif dan penolakan dari masyarakat, serta peluang yang tidak seimbang antara program pendidikan dan kesempatan kerja. Permasalahan tersebut menandakan bahwa penyandang disabilitas belum memperoleh hak secara memadai, khususnya hak aksesibilitas. Hal ini diperkuat dengan pelayanan dan infrastruktur yang belum seluruhnya berbasis pada kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Hak aksesibilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 18 berarti bahwa penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Aksesibilitas berarti kemudahan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas untuk menjangkau pelayanan berdasarkan kesamaan kesempatan. Bidang aksesibilitas terbagi ke dalam bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, sarana prasarana, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Bidang-bidang tersebut pun dibagi ke dalam aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik berarti harus melengkapi fasilitas umum yang ada dan dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, sedangkan aksesibilitas non fisik

yaitu menciptakan kondisi dan situasi yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fisik dan non fisik pada bidang-bidang tersebut, di Indonesia belum terlaksana sepenuhnya.

Terbukti dari kondisi penyandang disabilitas yang masih sulit dalam menjangkau layanan-layanan yang ada di lingkungan. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan fasilitas yang ada di lingkungan karena masyarakat belum memerhatikan kebutuhan penyandang disabilitas seperti infrastruktur yang belum dibuat landai untuk pengguna kursi roda, trotoar yang tidak memiliki rambu-rambu bagi penyandang disabilitas sensorik, serta penyandang disabilitas belum mendapatkan prioritas dalam memperoleh pelayanan. Kenyataannya, penyandang disabilitas masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan sebaliknya. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan bahwa seseorang dikatakan disabilitas ketika lingkungan tidak memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh berdasarkan kesamaan kesempatan.

Oleh karena itu, penyandang disabilitas menjadi tidak akses karena lingkungan belum memberikan dukungan, baik dalam bentuk aksesibilitas fisik maupun non fisik. Aksesibilitas yang sulit tidak hanya dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia yang berjumlah 6.008.640 jiwa dari 244.919.000 jiwa penduduk Indonesia berdasarkan data Pusdatinaker tahun 2014. Penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2011 yang berjumlah 153.909 jiwa pun belum seluruhnya akses terhadap pelayanan.

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung yang memiliki 2.008 jiwa penyandang disabilitas. Apabila menilik jumlah penyandang disabilitas di

beberapa desa di Kabupaten Bandung maka jumlah penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan relatif lebih banyak dibandingkan dengan desa lain, yaitu 97 jiwa yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik sebanyak 41 jiwa, disabilitas sensorik 13 jiwa, disabilitas intelektual 30 jiwa, disabilitas mental 7 jiwa, dan disabilitas ganda sebanyak 6 jiwa. Jumlah ini berdasarkan data praktikum yang diperoleh pada tahun 2016. Jumlah penyandang disabilitas tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan hasil praktikum, penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan memiliki beberapa masalah. Masalah yang sebagian besar dirasakan yaitu masalah aksesibilitas. Aksesibilitas yang terbatas di Desa Cibiru Wetan adalah aksesibilitas kesehatan, pekerjaan, sarana prasarana, dan transportasi. Penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan apabila sakit, harus menggunakan kendaraan pribadi atau ojek untuk berobat ke dokter atau puskesmas. Hal ini khususnya dialami oleh penyandang disabilitas yang tinggal di Dusun Cikoneng, yang letak geografinya jauh dari pusat desa. Keluarga harus memanggil ojek beberapa jam sebelum menuju pusat layanan karena ojek belum terjangkau dari tempat tinggal penyandang disabilitas. Selain pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan pun sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan. Adanya perusahaan-perusahaan di Desa Cibiru Wetan tidak berarti bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan secara layak. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan penyandang disabilitas rendah, sehingga keterampilan penyandang disabilitas pun terbatas. Aksesibilitas sarana prasarana pun belum memadai bagi penyandang disabilitas, khususnya sarana prasarana yang tersedia di rumah dan fasilitas umum. Penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan sulit melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri karena sarana prasarana belum menunjang mobilitas penyandang disabilitas.

Aksesibilitas yang memadai sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab penyandang disabilitas secara individu, melainkan juga menjadi tanggung jawab lingkungan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur hal tersebut, bahwa setiap warga negara bertanggung jawab dalam menghormati penyandang disabilitas salah satunya turut serta dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Keluarga, aparat pemerintah, lembaga/organisasi sosial, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat inklusi bagi penyandang disabilitas. Bentuk dari tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberian kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan yang ada di masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijakan atau program mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Desa Cibiru Wetan memiliki andil dalam membuat kebijakan atau program agar penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan mendapatkan kesempatan yang sama seperti warga Desa Cibiru Wetan pada umumnya. Upaya tersebut minimal dimulai dari sarana prasarana yang memudahkan penyandang disabilitas dalam menjangkau layanan yang ada di kantor desa. Selain peran penting aparat pemerintah desa, masyarakat pun memiliki tanggung jawab dengan cara membentuk Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai perwujudan pelayanan berbasis masyarakat dan hak yang ditujukan kepada penyandang disabilitas.

RBM merupakan salah satu lembaga yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tujuannya yaitu untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas. RBM dibentuk pada tingkat kelurahan atau desa pada setiap kabupaten/kota. Pelayanan yang dilakukan oleh RBM salah satunya yaitu pemberian pelayanan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas.

Hal ini didukung dengan pengertian RBM menurut Etty Padmiati dan Sri Kuntari (2011) yang menyatakan bahwa konsep utama RBM adalah pemberdayaan masyarakat, artinya bahwa pelayanan yang diberikan di dalam keluarga dan masyarakat memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil praktikum, diketahui bahwa RBM Cibiru Wetan digerakkan oleh masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan budaya Sunda yang masih menjunjung tinggi gotong-royong, dimana antar warga saling memberikan dukungan untuk mewujudkan kesejahteraan warga lainnya, dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas antara lain pelayanan terapi rutin setiap minggu ke-4, *home visit* untuk melihat kondisi penyandang disabilitas, serta pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas melalui penjangkauan ke kabupaten dan lembaga sosial. RBM sudah melakukan serangkaian kegiatan tersebut, tetapi dalam prosesnya belum berjalan secara menyeluruh karena proses pelayanan belum komprehensif, pengelolaan RBM belum menyeluruh, serta kerjasama RBM bersama dengan pihak lain belum terpadu.

Pengurus RBM Cibiru Wetan yang tertulis dalam Surat Keputusan Susunan Kepengurusan RBM Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berjumlah 7 orang, tetapi ketika kegiatan berlangsung, pengurus yang aktif hanya 3-4 orang. Adapun masalah yang dialami oleh RBM yaitu dengan jumlah pengurus yang terbatas, pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas pun menjadi kurang menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang belum terimplementasi dengan baik. Adanya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial dalam struktur kepengurusan RBM tidak berarti bahwa penyandang disabilitas memperoleh pelayanan secara komprehensif karena pengurus RBM

yang memiliki tupoksi masing-masing, dalam pemberian pelayanannya pun masih berjalan secara parsial.

Bidang-bidang yang ada di RBM terkadang menjadi tumpang tindih dikarenakan tanggung jawab yang belum terlaksana dengan baik. Bidang ekonomi menjalankan tugas untuk mencari dana dalam mendukung keberlangsungan RBM, tetapi di balik itu, bidang ekonomi sulit untuk terlibat dalam memberikan pelayanan secara langsung. Sama halnya ketika evaluasi RBM berlangsung, hanya 3-4 pengurus saja yang hadir, padahal pendapat dan masukan seluruh pengurus dibutuhkan. Kurangnya partisipasi pengurus RBM dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas menjadikan kerjasama dan dukungan antar pengurus melemah.

Selain masalah tersebut, kerjasama dengan pihak lain perlu ditingkatkan. RBM Cibiru Wetan sudah melakukan kerjasama dengan dunia usaha, salah satunya ketika Hari Disabilitas Internasional, tetapi kerjasama tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan. Hasil dari kerjasama dengan dunia usaha salah satunya adalah pemberian air mineral sebanyak 4 kardus dari perusahaan air minum Alexa. RBM pun sudah menjangkau perusahaan air minum Al-Ma'soem dan Hotel Cibiru Endah, tetapi dunia usaha tersebut belum memberikan respon yang baik secara berkelanjutan. Selain dunia usaha, RBM juga bekerjasama dengan lembaga Rinjani untuk memberikan layanan terapi secara rutin kepada penyandang disabilitas. Namun demikian, lembaga Rinjani belum dapat melakukan penjangkauan terhadap penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses lokasi terapi.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh RBM menunjukkan bahwa RBM belum memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas yang ditujukan kepada RBM sebagai lembaga yang memberikan pelayanan khususnya pelayanan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas serta lembaga yang menjalin kerjasama dengan

aparatus pemerintah, organisasi sosial, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Penguatan kapasitas menurut Jenivia Dwi Ratnasari, dkk (2013) adalah upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi, sehingga mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Adapun penguatan kapasitas menurut Penguatan kapasitas menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2015:69) adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Tujuan dari penguatan kapasitas agar RBM dapat memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas secara menyeluruh dan terpadu, dimana salah satunya RBM dapat melakukan pelayanan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Pencapaian dari penguatan kapasitas kepada pengurus RBM pada akhirnya dapat mengimplementasikan peribahasa Sunda yaitu *silih asah, silih asih, dan silih asuh*. Penguatan kapasitas sesuai dengan makna dari *silih asah*, dimana saling menambah pengetahuan, pengalaman, meningkatkan kualitas sehingga dapat menghadapi tantangan atau masalah. Adapun *silih asih* yaitu rasa atau tingkah laku yang memperlihatkan saling menyayangi, berbagi tanggung jawab, dan berdedikasi. Sedangkan *silih asuh* mengandung arti saling membimbing, mendidik, dan profesional. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian yang dilakukan yaitu tentang "Penguatan Kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung". Masalah tersebut difokuskan pada : 1) bagaimana karakteristik subyek?, 2) bagaimana gambaran Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Cibiru Wetan?, 3) bagaimana gambaran pelayanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Cibiru Wetan sebelum

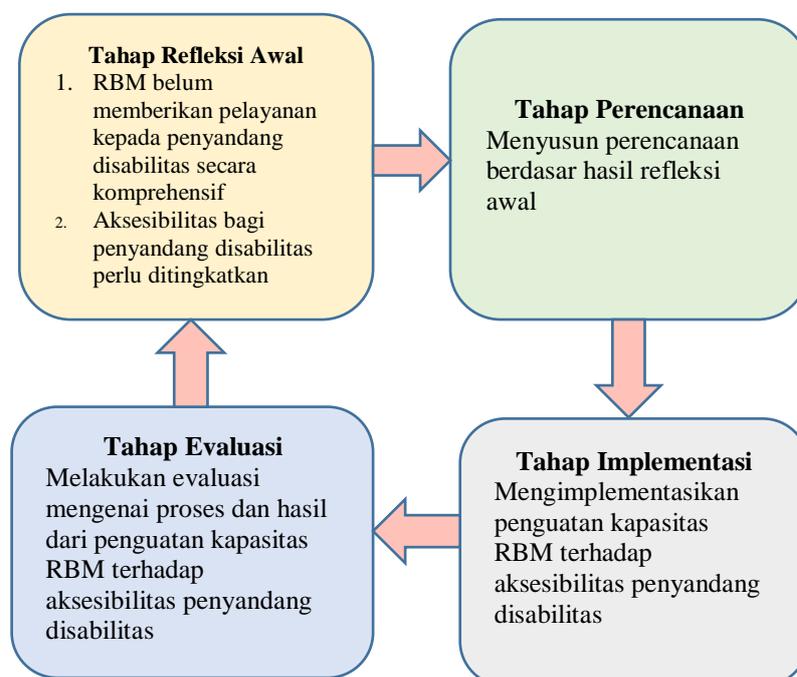
penguatan kapasitas?, 4) bagaimana pelaksanaan penguatan kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas?, dan 5) bagaimana gambaran pelayanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Cibiru Wetan setelah penguatan kapasitas ? Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang : 1) karakteristik subyek, 2) gambaran Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Cibiru Wetan, 3) gambaran pelayanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Cibiru Wetan sebelum penguatan kapasitas, 4) pelaksanaan penguatan kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas, dan 5) gambaran pelayanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Cibiru Wetan setelah penguatan kapasitas.

METODE

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif menggunakan *action research*. Bogdan dan Taylor dalam Lexi Moleong (2007:8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun

action research menurut Stringer, Ernest T (2007:19) harus didasarkan pada studi lokal yang berfokus pada kebutuhan untuk memahami bagaimana sesuatu terjadi, bukan hanya pada apa yang terjadi, dan untuk memahami cara-cara pemangku kebijakan (*stakeholder*) memandang, menafsirkan, dan menanggapi kegiatan yang terkait dengan isu yang diselidiki. *Action research* merupakan upaya mengujicobakan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi.

Penguatan kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki suatu situasi sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusi terhadap penyandang disabilitas. Modifikasi rancangan penelitian sesuai alur penelitian Penguatan Kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :



Bagan 1. Alur Penelitian

Tahapan penelitian terdiri dari tahap I, refleksi awal yaitu melakukan pengkajian hasil asesmen terhadap kondisi RBM terhadap pemberian pelayanan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas, tahap II merencanakan pelaksanaan penguatan kapasitas RBM terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas, tahap III pelaksanaan penguatan kapasitas RBM terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas, dan tahap IV evaluasi proses dan hasil dari pelaksanaan penguatan kapasitas RBM terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari 3 pengurus RBM melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif (*observation participation*), dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Teknik untuk menentukan subyek yaitu dengan menggunakan *purposive*, dimana penetapan pengurus RBM yang dijadikan sebagai subyek disesuaikan dengan beberapa kriteria, antara lain : 1) pengurus inti RBM Cibiru Wetan, 2) menjabat sebagai pengurus RBM Cibiru Wetan minimal 2 tahun, 3) mendapatkan pelatihan tentang RBM, dan 4) melakukan pelayanan langsung kepada penyandang disabilitas. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan RBM dan penyandang disabilitas yang mengalami masalah aksesibilitas.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif (*participant observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kepercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji ketergantungan (*dependability*), dan uji kepastian (*confirmability*). Analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, penajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil RBM Cibiru Wetan dibentuk secara resmi pada tahun 2013, sehingga saat ini RBM Cibiru Wetan sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. RBM Cibiru Wetan dibentuk berdasarkan keinginan dari Pekerja Sosial Masyarakat yang melihat fakta di lapangan mengenai kondisi penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas yang relatif banyak membuat Pekerja Sosial Masyarakat tergerak untuk membuat suatu lembaga yang berisikan kegiatan-kegiatan/layanan-layanan bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya warga Desa Cibiru Wetan. RBM Cibiru Wetan adalah lembaga pemberi pelayanan berbasis masyarakat yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat serta dikukuhkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung khususnya bidang rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu, RBM Cibiru Wetan menjadi mitra kerja bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bandung. RBM Cibiru Wetan belum memiliki sekretariat yang permanen. Sekretariat RBM tersebut berada di kampung Pamubusan RW 04. Adapun status bangunan belum menjadi hak milik, sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kepemilikannya.

Oleh karena itu, RBM Cibiru Wetan saat ini berupaya untuk memperoleh sekretariat yang layak, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas menjadi lebih kondusif. Proses pelayanan RBM terdiri dari inventarisasi data penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan. Adapun tahapan dan proses pelayanan RBM meliputi : 1) pendataan secara periodik, 2) asesmen penyandang disabilitas dan kebutuhannya, 3) prioritas penanganan penyandang disabilitas, 4) perencanaan pelayanan, 5) pemberian pelayanan, dan 6) pelaporan dan rujukan.

Visi RBM yaitu pemenuhan hak dasar khususnya dan wilayah Cileunyi umumnya. Visi RBM tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh RBM dalam jangka waktu panjang. Sedangkan misi RBM Cibiru Wetan adalah sebagai berikut : 1) memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk berkarya sesuai kemampuannya, 2) memandirikan penyandang disabilitas dan masyarakat dalam meminimalisir permasalahan sosial, 3) memperbaiki stigma masyarakat mengenai penyandang disabilitas, 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial, 5) memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan untuk memenuhi hak dasar mereka, 6) pemberdayaan keluarga penyandang disabilitas, dan 7) relawan dalam upaya kemandirian penyandang disabilitas.

RBM memiliki empat bidang, dimana keempat bidang tersebut memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun

penyandang disabilitas di Cibiru Wetan demikian, dari keempat bidang tersebut, tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bidang pendidikan tidak lagi menjadi kebutuhan prioritas penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas lebih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan usia penyandang disabilitas sudah masuk dalam usia bekerja. Oleh karena itu, struktur kepengurusan RBM perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. *Subyek* dalam penelitian ini terdiri dari tiga pengurus RBM yaitu FD, E, dan EK yang memiliki usia dan jenjang pendidikan beragam. Selain pengurus RBM Cibiru Wetan juga dalam penelitian ini ditentukan informan, yaitu orangtua penyandang disabilitas serta aparat desa yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. Oleh karena itu, informan di dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Informan Penelitian Tahun 2017

No	Infoman	Keterangan
1	FD	Subyek penelitian
2	E	Subyek penelitian
3	EK	Subyek penelitian
4	EJ	Orangtua penyandang disabilitas
5	Ac	Kasie Kesra Desa Cibiru Wetan

Tabel tersebut merupakan daftar informan atau pemberi informasi di dalam penelitian tentang : Penguatan Kapasitas RBM terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Informasi dari informan tersebut yang menjadi dasar perlu dilakukannya penguatan kapasitas terhadap RBM yang pada akhirnya penguatan kapasitas bagi RBM dapat meningkatkan pelayanan aksesibilitas penyandang disabilitas di Cibiru Wetan. Subyek FD adalah ketua RBM.

Usia FD 42 tahun, 42 tahun tergolong dalam usia produktif, dimana pada usia produktif ini,

seseorang memiliki gagasan dan berorientasi terhadap pekerjaan yang menjadikan RBM menjadi lebih baik. Ditunjang dengan pendidikan FD S1 maka FD dapat merefleksikan kebutuhan penyandang disabilitas akan pelayanan RBM. Pekerjaan FD sebagai ibu rumah tangga pun membuat FD memiliki komitmen yang cukup baik dan selalu memberikan kontribusi terhadap perkembangan RBM. Subyek penelitian selanjutnya yaitu E, subyek E adalah bendahara RBM yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas. Usia subyek E adalah 50 tahun, usia 50 tahun ini tergolong dalam

usia produktif, dimana pada usia ini seseorang memiliki orientasi terhadap pekerjaan, sehingga subyek E juga mempunyai orientasi terhadap pekerjaan dan memiliki motivasi untuk bekerja keras terutama dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Tingkat pendidikan subyek E adalah Sekolah Dasar, tingkat pendidikan SD dapat dikatakan relatif rendah, jika pendidikan seseorang rendah maka tidak dapat merefleksikan kebutuhan anggota keluarga atau orang lain. Namun demikian, subyek E yang memiliki tingkat pendidikan SD tidak menjadi penghalang untuk berperan aktif dalam RBM, justru subyek E sangat giat dan antusias dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Subyek E adalah ibu rumah tangga, sehingga waktunya cukup banyak untuk memperhatikan penyandang disabilitas, walaupun subyek E memiliki anak penyandang disabilitas. Mengingat pengalaman subyek E dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Cibiru Wetan maka subyek E sangat diharapkan kehadirannya untuk terlibat dalam mengurus RBM Cibiru Wetan. Hal ini dikarenakan pengalaman dan pengetahuan subyek E di dalam melaksanakan program RBM dapat dijadikan acuan untuk penyelenggaraan pelayanan RBM, serta subyek E pernah menjadi ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK) selama dua tahun, sehingga kinerjanya dapat digunakan untuk menguatkan RBM dalam memberikan pelayanan.

Subyek selanjutnya yaitu EK, subyek EK menjabat di RBM sebagai pengurus yang memiliki tanggung jawab di bidang sosial. Usia subyek EK 57 tahun, usia 57 tahun tergolong dalam usia produktif, dimana subyek EK memiliki orientasi terhadap pekerjaan yang membuat subyek EK selalu termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penyandang disabilitas. Hal ini ditunjang juga dengan pekerjaan subyek EK sebagai Ibu Rumah Tangga yang membuat subyek EK

memiliki waktu luang yang cukup, sehingga tanggung jawab di RBM pun dijalankan dengan baik dengan berusaha untuk selalu menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh RBM. Tingkat pendidikan subyek EK adalah SMP, pendidikan yang rendah mempengaruhi pengetahuan serta keterampilan seseorang, tetapi tidak pada subyek EK. Subyek EK justru memiliki keterampilan yang memadai dikarenakan pengalamannya sebagai kader PKK sejak tahun 2011.

Tugas sebagai kader yang diemban oleh subyek EK memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan di RBM dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan karakteristik ketiga subyek menunjukkan bahwa ketiga subyek memungkinkan untuk memberikan layanan RBM kepada penyandang disabilitas, walaupun ketiga subyek penelitian memiliki keragaman usia dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang lebih komprehensif dan terintegrasi maka diperlukan penguatan kapasitas bagi pengurus RBM Cibiru Wetan.

Refleksi awal adalah rangkaian dari alur penelitian yang dilakukan bersama dengan pengurus RBM, masyarakat peduli disabilitas, dan orangtua penyandang disabilitas untuk menggali kebutuhan dan masalah RBM. Adapun **perencanaan** juga bagian dari penelitian yang bertujuan untuk merencanakan suatu program dalam memecahkan masalah dan kebutuhan prioritas RBM yang ditentukan dari hasil refleksi awal.

Hasil refleksi awal tergambar melalui gambaran pelayanan RBM Cibiru Wetan sebelum penguatan kapasitas. Jenis pelayanan yang ada di RBM Cibiru Wetan terdiri dari pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang tidak hanya dilakukan sendiri oleh pengurus RBM melainkan juga melibatkan pihak lain dengan harapan agar penyandang disabilitas dapat terpenuhi kebutuhannya. Namun demikian, tidak semua jenis pelayanan yang diselenggarakan RBM Cibiru Wetan sesuai dengan kebutuhan

penyangang disabilitas. Hal ini dikarenakan jenis pelayanan yang tersedia meliputi kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Apabila dikaitkan dengan usia penyangang disabilitas, pendidikan bukan lagi menjadi prioritas penyangang disabilitas. Kebutuhan penyangang disabilitas adalah kebutuhan akan pekerjaan karena dengan diperolehnya pekerjaan yang layak, penyangang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung kepada orang lain.

Oleh karena itu, pengurus RBM pada dasarnya memang harus memperhatikan kebutuhan penyangang disabilitas agar pelayanan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya. Sebelum penyangang disabilitas mendapatkan pelayanan di RBM, proses pelayanan adalah bagian penting yang harus dijalani terlebih dahulu. Proses tersebut terdiri dari tahapan mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi oleh penyangang disabilitas serta proses menggali masalah dan kebutuhan penyangang disabilitas untuk mengetahui pelayanan yang tepat diberikan kepada penyangang disabilitas. Namun faktanya, proses pelayanan yang dilakukan oleh pengurus RBM hanya mengandalkan RT/RW, kader, dan keluarga penyangang disabilitas. Adapun prosedur dalam mendapatkan pelayanan RBM sangat mudah untuk dijangkau oleh penyangang disabilitas Cibiru Wetan. Hal ini dikarenakan persyaratan yang ditentukan oleh RBM tidak berbelit-belit. Namun demikian, persyaratan yang tidak berbelit-belit tersebut harus disertai dengan pelayanan yang komprehensif, sehingga pengurus RBM Cibiru Wetan memerlukan pelatihan keterampilan yang menunjang layanan yang diberikan kepada penyangang disabilitas. Prosedur pelayanan dikatakan mudah manakala persyaratan tidak berbelit-belit dan kriteria sasaran pun sederhana.

Oleh karena itu, sasaran RBM ditujukan kepada seluruh penyangang disabilitas yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. RBM menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada dalam garis kemiskinan. Penyangang disabilitas yang

berasal dari keluarga miskin adalah bagian dari masyarakat dan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, RBM menjadi solusi dalam memfasilitasi penyangang disabilitas untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhannya. Adapun kegiatan-kegiatan yang diterima oleh penyangang disabilitas sebagai bentuk pelayanan yang tersedia yaitu terapi rutin, bakti sosial, pelibatan penyangang disabilitas dalam pemilu, fasilitasi pembuatan e-KTP, dan lain sebagainya.

Kegiatan yang diselenggarakan RBM dalam pelayanan aksesibilitas menjunjung tinggi hak penyangang disabilitas. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa penyangang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan terutama dalam berpartisipasi di masyarakat.

Oleh karena itu, agar tujuan tersebut tercapai, masyarakat harus mengetahui kegiatan RBM agar hak penyangang disabilitas terimplementasi dengan baik. Penyusunan rencana kerja yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan penyangang disabilitas adalah upaya untuk mewujudkan hal tersebut agar menjadi lebih terarah dan terorganisir. Tidak hanya rencana kerja, RBM juga harus mengelola kembali kepengurusan RBM agar berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Implementasi tupoksi pengurus dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan penyangang disabilitas.

Saat ini, implementasi kepengurusan RBM belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak semua pengurus hadir di lapangan ketika kegiatan berlangsung. Kemampuan pengurus tidak hanya diperkuat melalui implementasi tupoksi yang sesuai, tetapi juga harus diimbangi dengan kerjasama dan dukungan yang baik antara pengurus.

Menurut subyek EK, kerjasama dan dukungan pengurus RBM belum berjalan dengan baik karena masih ada kesenjangan dan rasa sungkan antar pengurus RBM. Hal ini

seharusnya dievaluasi untuk memperbaiki hubungan antara pengurus agar kerjasama dan dukungan menjadi lebih baik lagi karena kerjasama dan dukungan adalah bagian dari keterampilan yang harus dimiliki oleh pengurus RBM.

Keterampilan yang harus dimiliki pengurus selain kerjasama dan saling memberikan dukungan adalah keterampilan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan (*recording*). *Recording* adalah bagian yang sangat penting karena merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh RBM. RBM Cibiru Wetan belum melakukan *recording* secara menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa RBM sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas membutuhkan pengembangan kemampuan keterampilan bagi pengurus RBM karena keterampilan yang memadai akan berdampak pada pelayanan RBM yang menyeluruh. Pengembangan kemampuan keterampilan tersebut dapat ditunjang dengan penguatan kapasitas.

Penguatan kapasitas yang dimaksud adalah proses pemberian keterampilan yang dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan RBM dan penyandang disabilitas, asesmen, perencanaan pelayanan, manajemen organisasi, jejaring kerja, sampai pada kemampuan pencatatan (*recording*). **Implementasi** dari hasil perencanaan yang telah dilakukan bersama dengan pengurus RBM, masyarakat peduli penyandang disabilitas, dan orangtua penyandang disabilitas diwujudkan dalam bentuk penguatan kapasitas pengurus RBM terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas. Rangkaian dari penguatan kapasitas meliputi *pre-test*, pelatihan identifikasi, pelatihan asesmen, pelatihan perencanaan pelayanan, pelatihan manajemen organisasi, pelatihan jejaring kerja, pelatihan *recording*, dan *post-test*.

Sasaran penguatan kapasitas terdiri dari pengurus RBM, masyarakat peduli penyandang disabilitas, dan orangtua penyandang

disabilitas. Adapun metode pekerjaan sosial yang digunakan dalam penguatan kapasitas yaitu *social groupwork* dengan jenis kelompok edukasi.

Pelatihan pertama adalah pelatihan identifikasi yang bertujuan untuk merinci isu-isu masalah sehubungan dengan pelaksanaan RBM dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan agar RBM dapat melakukan identifikasi terhadap perkembangan pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, juga untuk mengetahui penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan atau pelayanan dari RBM Cibiru Wetan. Proses dalam pelatihan ini peserta diberikan materi mengenai identifikasi kemudian selanjutnya praktik untuk merinci isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan. Hasil dari pelatihan identifikasi yaitu ditemukannya isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Isu-isu tersebut disajikan dalam bentuk pemetaan masalah penyandang disabilitas dan *database* penyandang disabilitas Cibiru.

Pelatihan kedua yaitu asesmen yang bertujuan agar meningkatnya keterampilan pengurus RBM dalam memahami dan menggali masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta meningkatnya keterampilan pengurus RBM dalam menggunakan teknik asesmen terhadap penyandang disabilitas. Proses pada pelatihan asesmen dimulai dengan penyampaian materi mengenai pengertian asesmen dan pentingnya asesmen dalam suatu pelayanan, unsur-unsur dalam asesmen, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen, proses asesmen, dan alat-alat asesmen. Setelah materi selesai disampaikan, dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan asesmen. Setelah selesai berdiskusi, narasumber mengajak peserta untuk mempraktikkan teknik dalam asesmen.

Teknik tersebut yaitu wawancara dan genogram. Teknisnya, peserta diminta untuk berpasang-pasangan (2 orang), sehingga

terbagi menjadi beberapa kelompok. Sesi ini bertujuan untuk mengakrabkan peserta. Setelah selesai memilih pasangan, tahapan selanjutnya yaitu 1) peserta mendapatkan kertas dan pena, 2) masing-masing peserta menggali silsilah keluarga pasangannya, 3) jawaban dari pasangan disajikan dalam bentuk genogram, dan 4) hasil genogram dipaparkan ke peserta. Teknik wawancara secara tidak langsung dipraktikkan pula dalam kesempatan ini untuk menggali informasi dari pasangan yang ingin diketahui silsilah keluarganya.

Keterampilan dalam wawancara harus dimiliki oleh pengurus RBM karena wawancara adalah teknik dasar yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam. Tujuan dilakukannya wawancara untuk mengumpulkan data atau informasi yang akan sangat berguna dalam pemberian pelayanan RBM kepada penyandang disabilitas. Hasil pelatihan asesmen menunjukkan bahwa keterampilan peserta dalam melakukan asesmen menjadi lebih baik. Pelatihan asesmen memberikan tambahan kemampuan kepada pengurus RBM mengenai teknik-teknik dalam asesmen.

Teknik asesmen yang diberikan dalam pelatihan memberikan manfaat kepada pengurus RBM bahwa ada cara yang lebih mudah untuk menggali kebutuhan penyandang disabilitas. Namun demikian, pengurus RBM belum terbiasa menggunakan teknik tersebut, sehingga harus ada pembiasaan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa RBM mengalami progres dalam tahapan asesmen.

Adapun *outcome* dari pelatihan ini yaitu tersedianya *form* asesmen yang disusun dan disepakati bersama untuk digunakan dalam mengasesmen penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan pelayanan RBM. *Form* tersebut berisikan format identitas klien, latar belakang, gejala masalah, faktor penyebab, dinamika keberfungsian klien, lingkungan sosial, dan fokus masalah. Hasil yang berkaitan dengan rangkuman tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan pelayanan.

Pelatihan ketiga yaitu pelatihan perencanaan pelayanan bertujuan agar meningkatnya keterampilan pengurus RBM dalam membuat rencana pelayanan terhadap penyandang disabilitas dengan memperhatikan aspek kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas. Pelatihan perencanaan pelayanan dimulai dengan pemberian materi tentang pengertian perencanaan dan pentingnya perencanaan dalam pelayanan, serta sistematika rencana tindak lanjut suatu pelayanan. Narasumber menyampaikan materi secara singkat dan padat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk diskusi dan tanya jawab menjadi lebih banyak. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pengalaman yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan terutama perencanaan pelayanan yang dilakukan di RBM. Setelah sesi diskusi berakhir, dilanjutkan dengan sesi praktik.

Pada sesi ini peserta dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok diberikan sebuah kasus. Tugas kelompok adalah membuat rencana tindak lanjut untuk memecahkan masalah pada kasus tersebut. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keakraban antar pengurus dan melatih kemampuan analisis peserta. Setelah selesai membuat rencana tindak lanjut dalam menyelesaikan masalah dalam kasus, masing-masing kelompok diminta untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan umum. Hasil pelatihan perencanaan pelayanan menunjukkan bahwa pengurus RBM belajar memecahkan masalah melalui diskusi dan menyusun rencana tindak lanjut dengan memperhatikan metode dan strategi tertentu. Selama ini RBM belum melakukan hal ini manakala memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, adanya pelatihan perencanaan memberikan keterampilan baru kepada pengurus RBM mengenai aspek yang harus ada di dalam perencanaan pelayanan dan bagaimana penerapannya.

Pelatihan keempat adalah pelatihan manajemen organisasi yang bertujuan agar meningkatnya keterampilan pengurus RBM dalam mengelola organisasi dan adanya

pembaharuan tugas pokok dan fungsi pengurus RBM yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Proses pelatihan manajemen organisasi dimulai dengan menggambarkan RBM terlebih dahulu, mulai dari perubahan paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengertian RBM, pelaksana RBM, proses layanan di RBM, penyusunan rencana program RBM, sampai struktur RBM.

Beberapa hal tersebut disampaikan untuk memberikan kesadaran kepada peserta mengenai pentingnya tata kelola RBM demi mencapai pelayanan yang menyeluruh kepada penyandang disabilitas. Setelah selesai menyampaikan materi, narasumber bersama dengan peserta menggali bersama kebutuhan dan masalah RBM terutama yang terkait dengan manajemen organisasi. Peserta berdiskusi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengurus, berikut juga struktur pengurus yang ada di RBM Cibiru Wetan. Peserta mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tupoksi dan stuktur RBM berikut hak dan tanggung jawab pengurus. Hasil dari pelatihan manajemen organisasi memberikan keterampilan kepada pengurus RBM untuk melakukan revitalisasi struktur kepengurusan RBM. Pelayanan yang layak bagi penyandang disabilitas diperoleh manakala organisasi terampil dan bertanggung jawab terhadap tupoksi yang dimilikinya.

Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan manajemen organisasi, menambah keterampilan pengurus RBM dalam menyusun struktur kepengurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pelatihan kelima yaitu pelatihan jejaring kerja yang bertujuan agar meningkatnya keterampilan pengurus RBM dalam memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di masyarakat, serta meningkatnya keterampilan pengurus RBM dalam mengelola jejaring kerja yang bermanfaat bagi pelayanan penyandang disabilitas. Proses pelatihan jejaring kerja dimulai dengan keterampilan untuk mengaitkan pihak-pihak yang akan bekerjasama dengan RBM. Saat ini RBM sudah memiliki beberapa jejaring yang membantu dalam pemberian

pelayanan kepada penyandang disabilitas, tetapi jejaring kerja tersebut masih berjalan masing-masing tanpa adanya sinergitas.

Oleh karena itu, narasumber menyampaikan materi tentang pengertian jejaring kerja, tujuan dan manfaat jejaring kerja, aspek jejaring kerja, prinsip membangun jejaring kerja, dan langkah-langkah dalam membangun jejaring. Narasumber membantu peserta untuk memahami jejaring kerja dengan melakukan simulasi jejaring kerja. Hal ini dilakukan agar peserta mendapatkan gambaran mengenai jejaring kerja seperti apa yang harus diajak bermitra dan bagaimana melakukannya. Peserta diberikan tali rafia yang kemudian dililitkan ke tubuh peserta. Tali tersebut tersambung dari peserta satu ke peserta lainnya. Setelah itu, tali harus dilitkan kembali menjadi satu seperti semula. Proses ini mengajarkan kerjasama, koordinasi, dan cara bermitra.

Hasil dari pelatihan jejaring kerja menunjukkan bahwa pengurus RBM lebih terampil dalam bersinergi dengan pihak lain. RBM sudah bekerjasama dengan berbagai pihak, tetapi sinergitas antara RBM dan pihak-pihak tersebut belum saling terkait.

Oleh karena itu, adanya pelatihan jejaring kerja membuka pikiran pengurus RBM untuk membuat daftar jejaring kerja dan menyusun relevansinya terhadap pelayanan RBM. Hasil lain dari pelatihan ini yaitu RBM membuat pemetaan sistem sumber yang dapat dijangkau untuk mendukung pelayanan bagi penyandang disabilitas serta keterkaitan antara sistem sumber yang satu dengan sistem sumber lainnya. Oleh karena itu, tersusunlah peta jejaring kerja RBM dengan pihak lain yang termasuk dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pelatihan keenam adalah pelatihan *recording* yang bertujuan agar meningkatnya keterampilan pengurus RBM dalam membuat pelaporan dan pencatatan secara rutin dan jelas. Proses pelatihan *recording* dilakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelayanan yang diberikan pengurus RBM kepada penyandang disabilitas. Materi mengenai

recording berkaitan dengan pengertian *recording*, tujuan dan manfaat *recording*, jenis-jenis *recording*, mekanisme laporan, dan sistematika laporan.

Setelah penyampaian materi selesai, diskusi berlanjut bersamaan dengan evaluasi laporan yang dibuat oleh RBM. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki dokumentasi laporan agar lebih baik lagi. Tidak lupa, praktik membuat proposal dengan sistematika yang sesuai pun dilakukan agar RBM dapat menjangkau jejaring kerja lebih luas. Hasil dari pelatihan *recording* yaitu pengurus RBM menjadi terampil dalam mengelola catatan dan pelaporan yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban lembaga. Begitu pula mengenai perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam *recording*, memberikan pengaruh terhadap motivasi pengurus untuk menuliskan laporan. Adanya keterampilan dan motivasi pengurus dalam menuliskan laporan secara tidak langsung mempengaruhi tanggung jawab pengurus.

Gambaran RBM setelah mendapatkan penguatan kapasitas menunjukkan adanya peningkatan keterampilan pengurus dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari jenis pelayanan yang diberikan oleh RBM menjadi berkembang dan mengacu pada kebutuhan penyandang disabilitas. Jenis pelayanan yang tadinya mencakup sosial, kesehatan, dan pendidikan, dengan adanya penguatan kapasitas, jenis pelayanan menjadi bertambah. Jenis pelayanan yang tadinya disesuaikan dengan bidang kepengurusan RBM, saat ini sudah didasari pada kebutuhan penyandang disabilitas dan sesuai dengan standar.

Adapun standar yang menjadi acuan RBM adalah membagi pelayanan ke dalam beberapa seksi yaitu seksi identifikasi dan asesmen, seksi pelayanan dan rehabilitasi, seksi penggalangan dana dan CSR, dan seksi rujukan. Penyandang disabilitas yang ingin memperoleh layanan di

RBM harus melalui proses layanan yang lebih komprehensif. RBM setelah mengikuti penguatan kapasitas menjadi memahami pentingnya identifikasi, asesmen, dan perencanaan sehingga tahapan ini menjadi perhatian sebelum memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Hasil asesmen yang rinci dan berharap menghasilkan kebutuhan penyandang disabilitas yang tepat, didukung dengan adanya *form* asesmen yang mencakup identitas klien, latar belakang, gejala masalah, faktor penyebab, dinamika keberfungsian klien, lingkungan sosial, dan fokus masalah. Sedangkan pada tahapan perencanaan, yang tadinya RBM memukul rata pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, setelah penguatan kapasitas pengurus RBM telah membuat *form* rencana tindak lanjut yang akan memudahkan seluruh pengurus RBM merumuskan rencana pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan termasuk di dalamnya terdapat aspek sasaran yang memudahkan pengurus dalam menentukan sasaran pelayanan. Setelah penyandang disabilitas melalui tahapan identifikasi, asesmen, dan perencanaan maka penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. RBM telah mempersiapkan pelayanan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan tersebut tersaji dalam beberapa kegiatan. Kegiatan RBM yang diselenggarakan dalam pelayanan aksesibilitas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah disusun secara bersama oleh pengurus RBM.

Adapun kegiatan tersebut terdiri dari hidroterapi, *outing*, dan sosialisasi mengenai aksesibilitas. Hal ini menunjukkan bahwa RBM semakin memperhatikan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan dikarenakan kegiatan yang dirancang sudah mulai berorientasi pada kesamaan kesempatan penyandang disabilitas.

Kegiatan yang telah disusun oleh RBM dalam bentuk matriks kerja tersebut menjadi bukti

yang menunjukkan bahwa RBM Cibiru Wetan memiliki upaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RBM yang menjalankan kegiatan RBM setelah penguatan kapasitas tidak lagi berjumlah 7 orang, tetapi bertambah menjadi 12 orang. Adanya penambahan kuantitas pengurus RBM diharapkan sebanding dengan kualitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Subyek E mengatakan bahwa implementasi tugas dan fungsi pengurus dalam memberikan pelayanan terlihat dari kuantitas pengurus RBM setelah penguatan kapasitas yang menjadi bertambah.

Penambahan pengurus didasarkan pada hasil penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa orang yang berkomitmen dalam menjalankan tupoksi untuk memberikan pelayanan yang komprehensif kepada penyandang disabilitas. Implementasi tugas dan fungsi pengurus RBM yang didasari pada AD/ART dan kebutuhan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa RBM Cibiru Wetan berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, bentuk dari realisasi tupoksi pengurus RBM akan terlihat manakala pengurus nantinya memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Adanya pembagian tupoksi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas merupakan langkah awal untuk membuat RBM menjadi organisasi yang terkelola dengan baik. Penguatan kapasitas yang telah diselenggarakan dan melibatkan pengurus RBM menciptakan kerjasama dan dukungan yang lebih kuat lagi.

Pelayanan aksesibilitas yang membutuhkan sinergitas antara pengurus sedang diupayakan untuk diwujudkan. Keterampilan pengurus dalam melakukan *recording* setelah penguatan kapasitas mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pelaporan yang sudah mulai dirancang dalam bentuk lisan maupun tulisan yang didasari pada pemahaman bahwa pencatatan dan pelaporan penting dalam suatu lembaga/organisasi. Pengurus RBM mulai

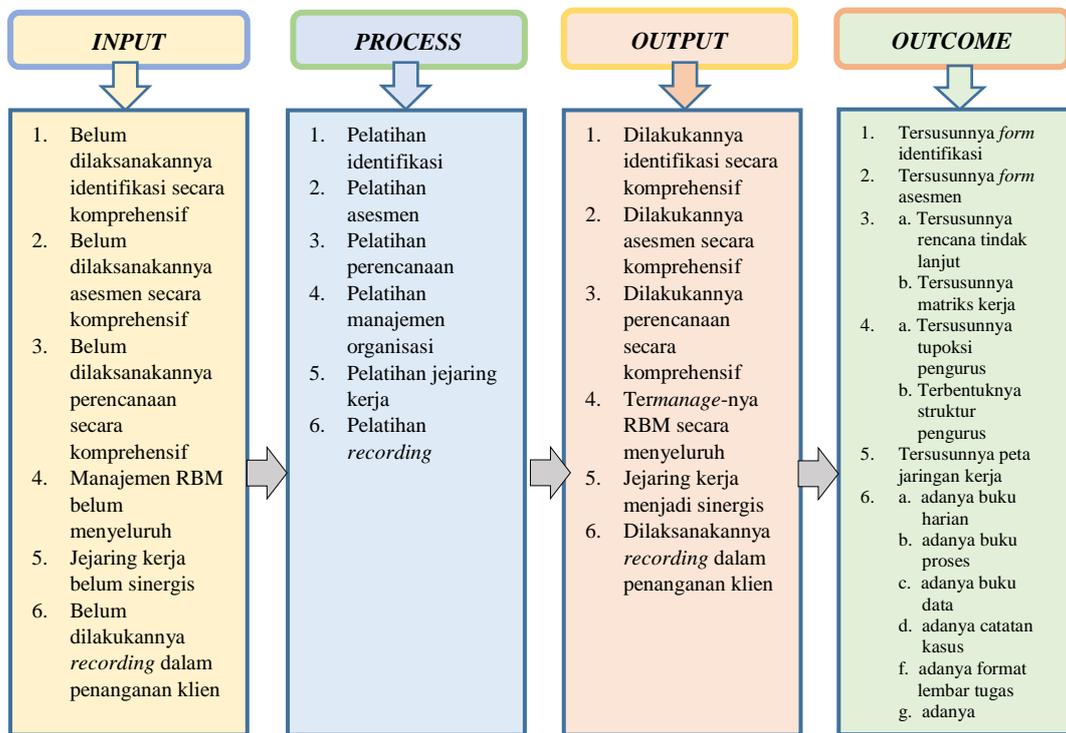
melakukan pelaporan dalam bentuk tulisan pada buku catatan dan media sosial. Langkah akhir setelah implementasi adalah *evaluasi*, dimana evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Penguatan Kapasitas RBM terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan metode partisipatif dengan pengurus RBM. Evaluasi terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil.

Evaluasi proses menunjukkan bahwa penguatan kapasitas terhadap pengurus RBM Cibiru Wetan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini didukung dengan kehadiran peserta yang terlibat dalam penguatan kapasitas sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga materi yang disampaikan tuntas dan diharapkan dapat terimplementasi dengan baik. Selain itu, pelaksanaan penguatan kapasitas berjalan dengan lancar didukung oleh kecakapan narasumber dalam memberikan keterampilan kepada pengurus RBM. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan penguatan kapasitas adalah ketersediaan sarana prasarana. Kondisi tempat pelatihan tidak bisa dipungkiri sedikit banyak mempengaruhi berjalannya kegiatan penguatan kapasitas. Hambatan lain yang ditemukan ketika pelatihan adalah rutinitas peserta pada hari Minggu untuk berjualan dan berkumpul dengan keluarga, sehingga ada keinginan untuk tidak hadir. Akan tetapi, setelah diberikan penjelasan akan pentingnya penguatan kapasitas, peserta akhirnya tetap mengikuti kegiatan meskipun terlambat, sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan.

Evaluasi hasil menunjukkan bahwa pengurus RBM yang mengikuti penguatan kapasitas memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah penyandang disabilitas, asesmen, menyusun perencanaan dan matriks kerja, , meningkatkan manajemen RBM, serta melakukan *recording* penanganan kasus penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, bukti nyata adanya perubahan pada

pelayanan yang diberikan oleh RBM kepada penyandang disabilitas didukung dengan tersedianya *form* identifikasi, *form* asesmen, matriks kerja RBM, tersusunnya tupoksi pengurus dan terbentuknya struktur kepengurusan RBM, serta tersusunnya peta jejaring kerja. Selain itu, pengurus RBM juga

mempersiapkan buku harian, buku proses, buku data, buku kasus, format lembar tugas, *database* penyandang disabilitas, dan proposal untuk mendokumentasikan setiap kasus dan kegiatan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan tergambar dalam bagan berikut ini:



Bagan 2. Model Penguatan Kapasitas RBM terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Pembahasan

RBM Cibiru Wetan setelah mendapatkan penguatan kapasitas, dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas memberikan jenis-jenis pelayanan bukan saja pelayanan terapi, rehabilitasi, pendidikan, kesehatan, melainkan pelayanan lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Pelayanan pendidikan diperuntukkan khususnya untuk Anak Penyandang Disabilitas, sedangkan untuk penyandang disabilitas akan diakses terhadap pelayanan pekerjaan, kesehatan, terapi, dan rehabilitasi sosial. Pelayanan yang diberikan oleh RBM didasari pada kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung kepada orang lain.

RBM sebagai lembaga yang memfasilitasi pelayanan kepada penyandang disabilitas, berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar penyandang disabilitas dapat berfungsi sosial sebagaimana orang pada umumnya. Jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas harus sebanding dengan proses pelayanan yang menyeluruh karena dengan adanya penguatan kapasitas, RBM yang tadinya hanya bergantung kepada RT/RW, kader, dan keluarga penyandang disabilitas dalam melakukan pendataan, menjadi lebih terarah dikarenakan RBM memiliki *form* identifikasi serta asesmen yang memadai. *Form* tersebut disusun untuk memudahkan pengurus RBM dalam menggali kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga

pemberian pelayanannya pun tidak asal diberikan. Asesmen yang baik didukung pula oleh keterampilan pengurus RBM dalam menggali lebih dalam kebutuhan penyandang disabilitas. Pelibatan *significant other* dibutuhkan sebagai pendukung data yang diperoleh dari penyandang disabilitas. Asesmen yang baik pun akan mempengaruhi perencanaan pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Perencanaan pelayanan didasari pada hasil asesmen.

Keterampilan analisis pengurus RBM dibutuhkan dalam tahapan ini karena rencana yang matang dan tepat akan diperoleh manakala pengurus RBM mampu menghubungkan informasi yang diperoleh dalam asesmen dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar tujuan tercapai. Format perencanaan pelayanan telah disusun dalam penguatan kapasitas, sehingga akan memudahkan pengurus RBM dalam merumuskan perencanaan bagi penyandang disabilitas. Identifikasi, asesmen, dan perencanaan adalah serangkaian proses pelayanan yang harus ada dalam suatu lembaga/organisasi yang dalam hal ini lembaga tersebut adalah RBM. Oleh karena itu, RBM diharapkan jangan sampai mengesampingkan ketiga tahapan tersebut. Hasil dari proses pelayanan adalah tersusunnya kegiatan-kegiatan yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik manakala pengurus RBM saling bersinergi untuk bekerjasama dan saling memberikan dukungan satu dengan lainnya. Solidaritas pengurus akan berdampak kepada pelayanan yang diberikan. Ketika pengurus kurang memiliki sinergitas maka berdampak pada pelayanan yang kurang menyeluruh karena pelayanan diberikan secara parsial. Penyandang disabilitas pun akan merasa tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari RBM. Oleh karena itu, implementasi tupoksi maupun kerjasama dan dukungan sangat diperlukan dalam suatu pelayanan. Tupoksi pengurus yang sudah tersusun dalam AD/ART kemudian diimplementasikan sesuai dengan yang seharusnya. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi

identifikasi dan asesmen, seksi pelayanan dan rehabilitasi, seksi penggalangan dan CSR, serta seksi rujukan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama karena suatu organisasi diibaratkan sebuah sistem yang saling terkait, memiliki unsur-unsur, dan memiliki tujuan yang sama.

Oleh karena itu, implementasi tupoksi yang tepat sangat diperlukan demi kelangsungan RBM ke depannya. Implementasi tupoksi pengurus RBM dapat dikaitkan dengan keterampilan pengurus RBM dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Apabila pengurus RBM memiliki keterampilan minimal dalam bidang masing-masing maka tupoksi tersebut akan berjalan selaras karena tidak akan terjadi tugas yang tumpang tindih, justru yang terjadi adalah saling melengkapi.

Pengurus akan saling membantu manakala mengetahui tujuan organisasi. Pengurus tidak akan berjalan sendiri-sendiri manakala mengetahui secara pasti tanggung jawab tugas yang dimiliki karena perwujudan dari kemampuan akan tanggung jawab lembaga/organisasi terlihat dari sejauh mana anggotanya memahami fungsi manajemen. Adanya kemampuan keterampilan pengurus dalam melakukan proses pelayanan (identifikasi, asesmen, perencanaan), kemudian mengorganisir kegiatan-kegiatan termasuk juga mengorganisir kebutuhan penyandang disabilitas yang diwujudkan dalam susunan kepengurusan serta AD/ART RBM, kemudian adanya kerjasama dan dukungan untuk bergerak bersama menggapai tujuan RBM, serta adanya komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas, membuktikan bahwa RBM berupaya untuk menjalankan fungsi manajemen yang menyeluruh. Penguatan kapasitas yang dilakukan terhadap pengurus RBM merupakan cara yang ditempuh untuk menjadikan fungsi manajemen RBM ini menjadi komprehensif dan dapat dimaknai oleh seluruh pengurus RBM. Apabila fungsi manajemen RBM sudah berjalan dengan baik maka secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Hasil tersebut akan tergambar pada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental pengurus RBM, dimana mental ini berkaitan dengan loyalitas serta dedikasi pengurus untuk menjadikan RBM Cibiru Wetan sebagai lembaga yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Perubahan-perubahan tersebut berimplikasi pada teori dan praktik pekerjaan sosial. Adapun implikasi penelitian terhadap teori pekerjaan sosial yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pekerjaan sosial khususnya tentang penguatan kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas.

Penguatan kapasitas yang diberikan kepada pengurus RBM didasarkan pada tugas utama RBM yaitu memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Keberadaan RBM sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola dan mendistribusikan manfaat-manfaat yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Keberadaan RBM sebagai lembaga yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, menjadi media untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan terapi, kesehatan, pekerjaan, sosial, serta pelayanan lainnya yang menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas karena aksesibilitas adalah salah satu hak penyandang disabilitas yang harus diterima dalam rangka mendukung kesempatan yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan konsep aksesibilitas, dimana aksesibilitas adalah kesempatan relatif untuk orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Apabila RBM sudah mendapatkan penguatan kapasitas maka pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas menjadi lebih baik karena penguatan kapasitas yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga lembaga RBM, sehingga RBM dapat berkembang menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya penguatan kapasitas dalam

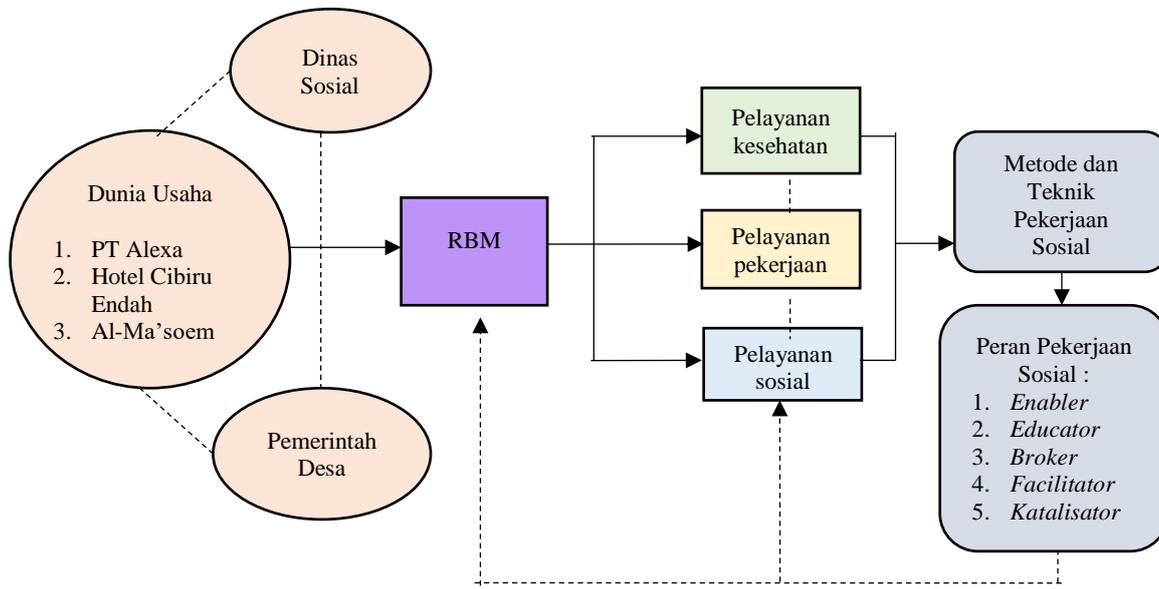
bentuk pelatihan identifikasi, asesmen, perencanaan, manajemen organisasi, jejaring kerja, dan *recording* yang diberikan kepada pengurus RBM memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya adalah pelayanan aksesibilitas. Implikasi praktis adalah dampak dari pelaksanaan Penguatan Kapasitas RBM terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terhadap pemecahan masalah penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan aksesibilitas. Adapun implikasi praktis dari penelitian ini yaitu pelayanan RBM yang komprehensif membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pengurus RBM. Komitmen kuat yang dimiliki oleh pengurus RBM didukung oleh para praktisi dan akademisi pekerjaan sosial untuk meningkatkan kemampuan pengurus RBM dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil implementasi tersebut, ditemukan bahwa penguatan kapasitas menjadi solusi untuk memecahkan masalah RBM dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Keberhasilan pelaksanaan Penguatan Kapasitas RBM terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung perlu pendampingan pekerja sosial. Adapun peran pekerja sosial antara lain : a) *enabler*, yaitu membantu RBM selaku lembaga yang memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas untuk menemukan kekuatan dan potensi serta memberikan keyakinan bahwa RBM memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada penyandang disabilitas, b) *educator*, pekerja sosial memberikan informasi tentang penyandang disabilitas dan keterampilan dalam mengelola lembaga kepada RBM berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pada peran ini, pekerja sosial menjadi seorang komunikator yang baik, sehingga informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pengurus RBM, c) *broker*,

pekerja sosial membantu menghubungkan RBM dengan sistem sumber yang ada di masyarakat, yang memungkinkan RBM untuk mendapatkannya, yang memberi dampak baik bagi kelangsungan pelayanan RBM kepada penyandang disabilitas., dan d) *facilitator*, pekerja sosial membantu menstimulasi penguatan kapasitas RBM. Pekerja sosial melakukan fasilitasi kelompok dalam

pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal, serta memastikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan semua keperluan yang dibutuhkan untuk terlaksananya pertemuan telah dipersiapkan.

Adapun model Penguatan Kapasitas RBM terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas tergambar dalam bagan berikut ini:



Bagan 3. Model Penguatan Kapasitas RBM terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

SIMPULAN

Pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang menjadi subyek penelitian adalah FD, E, dan EK, ketiga pengurus tersebut memiliki tugas memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Ketiga subyek memiliki keragaman usia dan pendidikan. Hal ini memberikan dampak pada pelayanan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas, dimana usia ketiga subyek tersebut tergolong pada usia produktif yang mengarah pada orientasi terhadap pekerjaan, sehingga pengurus RBM memiliki motivasi dan energi untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Keragaman pendidikan juga mempengaruhi interpretasi ketiga ketepatan pelayanan maupun kegiatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

pengurus terhadap pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, sehingga pelayanan yang tersedia dan diberikan didasarkan pada hasil dari pemikiran serta kemampuan pengurus RBM untuk mewujudkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Jenis pelayanan yang diberikan RBM Cibiru Wetan kepada penyandang disabilitas sebelum penguatan kapasitas adalah pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Jenis pelayanan tersebut belum disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Begitu pula dengan proses pelayanan belum berdasarkan identifikasi, asesmen, dan perencanaan serta proses pelayanan juga belum komprehensif, sehingga berpengaruh pada

Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus RBM Cibiru Wetan sangat perlu untuk diberikan penguatan agar dalam pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas tepat, sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, serta dapat memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk menjangkau pelayanan lainnya, seperti pelayanan untuk memperoleh kesempatan bekerja, memperoleh aksesibilitas akan fasilitas atau sarana dan prasarana agar penyandang disabilitas dapat melakukan mobilitas dan dapat beraktivitas.

Setelah pengurus RBM memperoleh penguatan kapasitas menunjukkan bahwa adanya perubahan pada pengurus RBM terutama jenis-jenis pelayanan RBM yang diberikan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, dimana pelayanan RBM mengarah pada aksesibilitas penyandang disabilitas. Begitu pula dengan proses pelayanan RBM, dimana kemampuan pengurus RBM dalam memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan hasil identifikasi, asesmen, dan perencanaan pelayanan yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini dilakukan sesuai dengan *form* identifikasi, *form* dan instrumen asesmen, serta dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas RBM Cibiru Wetan menyusun rencana kerja dalam satu tahun dengan membuat matriks kerja yang telah disepakati oleh seluruh pengurus RBM Cibiru Wetan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung. Di samping itu, RBM Cibiru Wetan sudah melakukan revitalisasi struktur kepengurusan RBM sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga implementasi tugas pokok dan fungsi yang terbentuk sudah sesuai dengan kebutuhan. RBM Cibiru Wetan juga sekarang sudah melakukan jejaring kerja (*networking*) yang diarahkan agar lebih terintegrasi melalui pembuatan peta jejaring kerja baik dengan Dinas atau instansi terkait dengan pelayanan aksesibilitas penyandang disabilitas atau dengan dunia usaha yang didukung dengan adanya bidang rujukan pada RBM.

memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas.

Seluruh rangkaian pelayanan RBM tidak berarti manakala tidak ada pencatatan dan pelaporan (*recording*) yang membuktikan bahwa pengurus RBM telah memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Sebelum penguatan kapasitas, RBM Cibiru Wetan belum melakukan pencatatan dan pelaporan (*recording*) pada penanganan kasus penyandang disabilitas, sehingga keterampilan pengurus RBM dalam aspek ini perlu ditingkatkan.

Setelah penguatan kapasitas, perubahan kemampuan pengurus RBM dalam menyusun *recording* terlihat dengan tersedianya format catatan harian, catatan proses, catatan data, dan catatan kasus, sehingga diketahui pelayanan apa saja yang sudah diberikan oleh pengurus RBM kepada penyandang disabilitas. Perubahan-perubahan yang terjadi pada RBM dilakukan melalui pemberian penguatan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengurus dalam memberikan pelayanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan.

Penguatan kapasitas mencakup pelatihan identifikasi, asesmen, perencanaan pelayanan, manajemen organisasi, jejaring kerja, dan *recording* yang melibatkan pengurus RBM, masyarakat peduli penyandang disabilitas, dan orangtua penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah *social groupwork* dengan teknik kelompok edukasi.

Perubahan yang terjadi pada pengurus RBM secara tidak langsung mempengaruhi aksesibilitas penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan. Adanya peningkatan keterampilan pada pengurus RBM dalam memberikan pelayanan menjadikan penyandang disabilitas akses terhadap pelayanan kesehatan, pekerjaan, sarana prasarana, dan transportasi. Penyandang disabilitas menjadi lebih mudah menjangkau layanan kesehatan di luar Desa Cibiru Wetan

Begitu pula aksesibilitas pekerjaan, dimana dengan adanya upaya untuk melakukan jejaring yang terintegrasi dengan dunia usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam bekerja guna memperbaiki kehidupan dan penghidupan.

Aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas belum mengalami perubahan yang berarti khususnya sarana prasarana yang tersedia di rumah penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan keluarga penyandang disabilitas belum menyadari sepenuhnya tanggung jawab untuk memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, RBM tetap berupaya untuk memenuhi aksesibilitas sarana prasarana penyandang disabilitas melalui advokasi ke keluarga penyandang disabilitas, pemerintah, dan dunia usaha, begitu juga dengan aksesibilitas transportasi.

Secara keseluruhan, perubahan RBM ke arah lebih baik terjadi setelah penguatan kapasitas. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan agar pelayanan menjadi lebih baik karena tujuan RBM pada dasarnya agar penyandang disabilitas dapat

diterima secara obyektif oleh keluarga serta berkembangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam upaya perlindungan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, rekomendasi kepada berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjadikan RBM lebih baik lagi ke depannya.

Rekomendasi ditujukan kepada RBM, pemerintah desa, keluarga penyandang disabilitas, dan dunia usaha agar penelitian ini dapat berkelanjutan (*sustainable*). Adapun rekomendasi tersebut antara lain : a) RBM diharapkan dapat memberikan pelayanan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan penyandang disabilitas, b) Pemerintah desa melalui kepala desa diharapkan mendukung eksistensi RBM dengan cara melakukan evaluasi kerja RBM, c) Keluarga penyandang disabilitas diharapkan peduli terhadap keberadaan pelayanan yang diberikan oleh RBM kepada penyandang disabilitas, dan d) Dunia usaha diharapkan memberikan dukungan terhadap pelayanan aksesibilitas RBM Cibiru Wetan melalui *Corporate Social Responsibility*, sehingga penyandang disabilitas di Cibiru Wetan dapat terakses dengan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfri. 2011. *Community Development : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Etty Padmiati dan Sri Kuntari. 2011. Forum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) “Dharma Kerthi Praja Pascima”: Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Kota Denpasar Propinsi Bali. *Jurnal Sosiokonsepia*. Vol.16, No.02
- Jenivia Dwi Ratnasari, dkk. 2013. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1, No.3: 103-110
- Jewell, Paul. 2010. *Disability Ethics : a Framework for Practitioners, Professionals, and Policy Makers*. Australia : Common Ground
- Lexi Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Stringer, Ernest T. 2007. *Action Research*. Third Edition. USA : Sage Publications

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta